

ETIKA DAN KEJUJURAN DALAM BERPOLITIK

Prihatin Dwi Santoro

Abstract

Talking about the ethics of participating in politics in the life of a nation and a country, we have to admit that nowadays many among the political elite tends to be politicking with ethical dereliction of outstanding statesmanship. An awful lot of the fact that their politicking done without rationality, emotions and putting forward the interests of the group, and does not give priority to the interests of a nation. Politics is not a purely pragmatic nature of case, which concerns only a goal and how to achieve those goals, that can be handled with rationality. Looks more like a political ethics demand that a destination that is selected must be justified by common sense that can be tested, and how to achieve them must be defined can be tested with the moral criteria. Honesty in politics is very important in the efforts to improve the situation of the nation is full of falsehoods. High low moral integrity of a person in politics to determine high low integrity of the personality and the quality of the politicking politicians. With still having our politicians are unscrupulous, allowing us to hope for improvement of politics and morality that are dilapidated.

Keywords: ethics, politics, honesty

A. PENDAHULUAN

Etika politik adalah salah satu sarana yang diharapkan bisa menghasilkan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Berbicara mengenai etika berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus mengakui bahwa saat ini banyak kalangan elite politik cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegarawanan. Banyak sekali kenyataan bahwa mereka berpolitik dilakukan tanpa rasionalitas, mengedepankan emosi dan kepentingan kelompok, serta tidak mengutamakan kepentingan berbangsa.

Etika politik mempunyai tujuan kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertatakrama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Etika politik harus menjadi pedoman utama dengan politik santun, cerdas, dan menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan. Politik bukanlah semata-mata perkara yang pragmatis sifatnya, yang hanya menyangkut suatu tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut, yang dapat ditangani dengan memakai rasionalitas. Politik lebih mirip suatu etika yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah dapat dites dengan kriteria moral.

Apakah politik kejujuran dan kejujuran dalam politik sungguh-sungguh bisa menjadi nyata? Untuk menjawab pertanyaan itu, pertama-tama tentu perlu dipahami terlebih dahulu apakah politik itu. Kata "politik" adalah sebuah rumusan yang kompleks dan dinamis. Penjelasan paling mudah barangkali dengan meminjam

ungkapan Kenneth Gergen (1999), yang mengatakan, dunia kita dibangun oleh kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan itu akan bisa berinteraksi dengan landasan kekuasaan. Mengenai kekuasaan, Michel Foucault (1976) menulis bahwa kekuasaan diciptakan dibuat melalui diskursus atau percakapan. Diskursus yang telah melembaga dalam institusi sosial-budaya itulah yang kemudian menciptakan norma-norma kekuasaan dan kontrol. Wacana (discourse), menurut Foucault, dibuat dan diabadikan oleh mereka yang memiliki kekuatan dan sarana komunikasi. Menurut Foucault, kebenaran, moralitas, dan makna dibentuk melalui discourse itu. Kejujuran dalam politik bukan hanya terbatas pada persoalan sistem dan manusia. Kejujuran mencakup pula problem literasi terhadap diskursus. Sistem yang rigid bisa saja bocor ketika manusia-manusia baik (secara normatif) di dalamnya tidak mampu menafsirkan diskursus yang sedang berlangsung. Pemahaman Foucaultian ini agaknya penting untuk melengkapi upaya-upaya kita membangun sistem politik yang terlepas dari sifat-sifat buruknya.

Terkait dengan cita-cita membentuk bangsa dan negara Indonesia yang lahir dari proses politik yang sehat, kejujuran dalam berpolitik mutlak menjadi landasan etisnya. Sayangnya, kejujuran menjadi mitos politik yang mungkin dianggap usang dan terlalu tradisional digenggam oleh para politisi saat ini. Kejujuran nyaris selalu hilang dalam setiap pagelaran demokrasi seperti pemilu, pilkada, atau yang lainnya. Dimulai dari ketidakjujuran, persoalan terus berlanjut hingga kerja mengurus rakyat secara serius dan kongkret selalu terhambat dan terbengkalai. Beberapa tahun terakhir ini sosok wakil rakyat, khususnya politisi DPR menjadi sorotan publik karena kinerjanya yang buruk dan berbagai masalah etika, mulai dari kejujuran, membolos saat rapat sampai masalah korupsi. Kejujuran bukanlah sebuah keutamaan moral yang berhenti setelah seseorang berhasil mencapainya. Kejujuran menuntut suatu usaha keras terus-menerus sepanjang waktu. Ketika hari ini kita jujur, tidak berarti kita menjadi manusia jujur karena atribut itu harus dibuktikan sepanjang waktu. Kesulitannya, situasi-situasi yang mengancam kehidupan atau eksistensi sering kali memaksa kita untuk mengabaikan, dan bahkan meninggalkan, kebenaran murni. Aktivitas politik termasuk dalam ranah yang mendorong politisi untuk berperilaku tidak jujur, itupun dengan lihai dibungkus dalam istilah "*white lies*" alias berbohong demi kebaikan. Padahal sebenarnya, berbohong demi kebaikan sama saja dengan paham menghalalkan segala cara. Kalau tujuan dipandang sebagai sesuatu yang benar, maka cara apapun boleh digunakan untuk mencapai tujuan itu, termasuk dengan berbohong.

Dalam berpolitik, kejujuran sangat memerlukan keberanian. Suatu keberanian yang dilandasi kesadaran, proses berpolitik yang tak sehat tak hanya merusak proses demokrasi yang tengah dibangun. Tetapi, juga merusak tatanan dan sistem politik yang seharusnya dijunjung tinggi dan dipatuhi bersama. Artinya, secara kasat mata publik melihat, politik saat ini masih didominasi permainan-permainan tidak sehat yang melahirkan para politisi bermental tidak sehat. Sehingga, orientasi politiknya pun tidak sehat, sebatas memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya meski harus menempuh cara-cara yang tidak sehat.

Dalam politik Machievelian, rakyat adalah orang sederhana yang hanya menilai dari penampilan dan gampang ditipu dan dibohongi. Dalam rumus politik versi machevelian ini, bahwa rakyat diposisikan sebagai obyek dari kebohongan politisi dan penguasa. Politisi dan penguasa dihadapan rakyatnya harus mempunyai dua wajah. Di hadapan rakyat seorang politisi harus bisa meyakinkan bahwa dia berpihak pada yang lemah. Pengentasan kemiskinan, pembelaan terhadap yang

lemah dan lain sebagainya adalah mantra politik paling canggih untuk memukau masyarakat awam.

Kejujuran dalam berpolitik sangat penting sekali dalam upaya memperbaiki keadaan bangsa ini yang penuh dengan kepalsuan. Mulai dari persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, katanya, kejujuran ini tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari pemerintah. Politisi yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya. Jadi, politisi yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral. Dasar pemikiran inilah penulis jadikan landasan untuk menyusun jurnal, bagaimana kejujuran menjadi alasan strategis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para politisi.

B. PEMBAHASAN

B.1 Politik Kotor dan Kejujuran

Apa yang dimaksud dengan statment bahwa politik itu kotor, kiranya pertamanya bahwa berpolitik berarti mencari dan mempertahankan kekuasaan. Dan kekuasaan itu katanya kotor. Untuk memperebutkannya orang harus keras, licik, pintar main bujuk ataupun memeras. Lawan harus dipukul tanpa ampun dan sahabat yang menjadi terlalu kuat harus dijegal sebelum menjadi ancaman. Menurut pandangan ini jangan kita mengandaikan kesetiaan dan jangan percaya pada cita-cita para politisi, yang mereka cari hanyalah kekuasaan dan demi kekuasaan itu segala nilai lain harus dikorbankan. Cita-cita luhur dan tujuan terpuji para politisi tidak lebih dari sekedar kamufase belaka, bagi kepentingan mereka yang sebenarnya adalah kekuasaan. Politik dianggap telah merosot sebagai bisnis untuk menjadi kaya raya bersama seluruh keluarga, di sini integritas pribadi politisi dituduh hilang sama sekali. Ia bukan hanya mengotori tangannya demi kekuasaan politik, demi untuk memenangkan suatu cause, melainkan ia sendiri menjadi kotor. Satu-satunya cause itu adalah pamrih pribadi, kekayaan dan kekuasaan. Di lain pihak orang yang tidak mau menerima bahwa penggunaan kekuasaan di luar batas hukum adalah sesuatu yang lumrah, dicap sebagai bodoh dan naif. Pernyataan tentang kekotoran hakiki "bisnis politik" ternyata bukan sebuah deskripsi, melainkan bersifat ideologi. Fungsinya adalah melicinkan jalan bagi mereka yang memang bersedia main kotor demi kepentingan mereka sendiri. Pernyataan yang "self-serving" dan "selffulfilling" itu kedengarannya rendah hati dan realistis. Tetapi sebenarnya adalah kerendahan hati yang palsu dan realisme yang bohong.

Dalam konteks berkata jujur, ada suatu istilah yang disebut desepsi, berasal dari kata *decieve* yang berarti membuat orang percaya terhadap suatu hal yang tidak benar, meniru, atau membohongi. Desepsi meliputi berkata bohong, mengingkari, atau menolak, tidak memberikan informasi dan memberikan jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan atau tidak memberikan penjelasan sewaktu informasi dibutuhkan. Politik sebagai instrument untuk meraih kebajikan melalui artikulasi kepentingan seharusnya didasari oleh kejujuran. Hanya dengan kejujuran maka tujuan kebajikan tersebut akan bisa direalisasi. Sayangnya bahwa tujuan menciptakan kebajikan tersebut seringkali direduksi oleh berbagai tindakan para pelaku politik yang tidak mencerminkannya. Oleh karenanya, maka politik berbasis hati nurani dan kejujuran memang menjadi bagian yang seharusnya tidak terpisahkan dari seluruh para elit politik di mana pun posisinya. Jika di DPR, maka yang harus dikembangkan adalah membangun trust serta sikap dan tindakan yang menjunjung kebenaran dan kejujuran.

B.2 Kasus dan Perspektif Etika

Sebagai contoh kasus, beberapa waktu yang lalu wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso tengah dalam sorotan, setelah mengunjungi LP Sukamiskin. Sebenarnya tidak masalah bagi siapa saja yang mengunjungi LP, baik sekadar melihat-lihat kondisi penjara, atau untuk menjenguk penghuninya. Yang penting pengunjung mengikuti prosedur yang berlaku. Namun kemudian kunjungan Priyo ke LP Sukamiskin jadi sorotan publik karena Priyo tidak jujur soal kunjungan tersebut. Saat datang di LP Sukamiskin, Priyo mengaku sedang melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Hal ini sesuai dengan kewenangannya selaku wakil ketua DPR yang membidangi hukum. Tetapi, menurut kepala LP Sukamiskin, izin Priyo Budi Santoso ke LP untuk mengunjungi Fahd el Faouz, terpidana kasus korupsi pengadaan Al-Quran. Tidak hanya itu, pimpinan DPR yang lain, juga mengaku tidak pernah mengeluarkan tugas kepada Priyo untuk melakukan sidak ke LP Sukamiskin. Dengan demikian, dalam aksinya ke LP Sukamiskin, Priyo tidak jujur dalam dua hal, yaitu *pertama*, mengaku sidak, padahal hanya kunjungan biasa. *Kedua*, mengaku menjalankan tugas pimpinan DPR, padahal pimpinan DPR tidak pernah membahas dan menugasinya. Selain itu, Priyo juga menyalahgunakan wewenang yaitu waktu sidak yang melebihi jam kunjungan. *Kedua*, Priyo juga berbicara dengan banyak narapidana, padahal berdasarkan izin kunjungan, mestinya dia hanya bisa bicara dengan Fahd. Kunjungan ini makin mendapat sorotan setelah nama Priyo disebut-sebut ikut menerima *fee* dalam proyek pengadaan Alquran.

Untuk membahas tentang kejujuran menjadi alasan strategis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para politisi, akan dilihat melalui beberapa perspektif etika. Yaitu etika keutamaan, etika *deontologis* dan etika *teleologis*. Dalam etika keutamaan tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur, atau murah hati dan sebagainya. Etika keutamaan memandang sikap atau akhlak seseorang. Keutamaan dapat didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral.

Politik sebagai instrument untuk meraih kebajikan melalui artikulasi kepentingan seharusnya didasari oleh kejujuran. Hanya dengan kejujuran maka tujuan kebajikan tersebut akan bisa diwujudkan. Sayangnya bahwa tujuan menciptakan kebajikan tersebut seringkali direduksi oleh berbagai tindakan para pelaku politik yang tidak mencerminkannya. Jika dilihat dari perspektif etika keutamaan maka contoh kasus di atas menggambarkan bahwa kejujuran menjadi sesuatu yang langka dan mulai hilang dikalangan politisi DPR. Kita melihat dan merasakan bahwa kejujuran sepertinya sedang pergi meninggalkan bangsa ini. Seharusnya seorang politisi tidak hanya harus bersifat jujur ramah, namun harus penuh tanggung jawab. Seorang politisi tidak hanya pintar bersilat lidah namun mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan omongannya. Politik moral adalah sebuah kewajiban dalam penyelenggaraan politik yang sehat. Politik moral bagaikan sebuah panduan dan manual tindakan bagi politisi. Penuh tanggung jawab, populis, adil dan jujur adalah etika dalam politik yang tetap harus dijunjung tinggi.

Selain itu dapat diasumsikan bahwa, gagal berperilaku baik secara moral menunjukkan lemah atau keroposnya karakter moral seseorang. Sekali lagi, memiliki karakter moral artinya selalu berperilaku secara moral. Tentu selalu ada godaan atau peluang untuk berperilaku tidak bermoral, dan itulah realitas kemanusiaan kita. Yang membedakan seseorang memiliki karakter moral atau tidak adalah apakah dia konsisten dan memiliki komitmen berperilaku secara moral atau tidak. Ketika

seseorang berpolitik kejujuran menjadi sesuatu yang langka, padahal kejujuran para politisi bukan hanya keutamaan dasar yang harus kita tuntut, melainkan merupakan dasar kepribadian yang integral dan bertanggung jawab. Orang jujur pertama-tama akan jujur terhadap dirinya sendiri, membenci segala macam rasionalisasi serta menghindari pembawaan berlebihan. Akhirnya, orang jujur tidak perlu mengompensasikan perasaan minder dengan menjadi otoriter dan menindas. Kejujuran adalah prasyarat semua keutamaan moral lainnya. Semua sikap moral yang pada dirinya sendiri kita puji akan kehilangan nilai mereka bila orang yang memperlihatkannya tidak jujur. Tapi bagaimana kita menanggapi argumen bahwa untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, kesetiaan, kejujuran dan *fairness* harus dikesampingkan? Memang benar bahwa bidang politik bukan untuk orang yang polos atau suci. Kelicikan, untuk bersikap pragmatis, untuk tidak dihalang-halangi oleh perasaan sungkan dan pertimbangan sekadar kekeluargaan itu semua prasyarat seorang politisi yang mau sukses.

Pada etika *deontologi* yang merupakan etika di mana menitikberatkan pada cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Menurut etika ini, yang terpenting adalah “Apa tuntutan yang harus kita taati?”, bukan “Apa tujuan yang hendak kita capai?” (Brownlee 1982, 53). Kata *deontologi* berasal dari bahasa Yunani, yakni *deon* yang berarti “apa yang harus dilakukan”. Dengan demikian, *deontologi* merupakan suatu cara berpikir etis yang mendasarkan diri kepada prinsip, hukum, norma objektif yang dianggap harus berlaku mutlak dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu, *deontologi* ini hanya memperdulikan wajib atau tidaknya suatu perbuatan atau keputusan manusia. (Bartens 1997, 254) Etika yang *deontologi* berbicara tentang apa yang benar dan apa yang salah.

Dalam perspektif etika *deontologis* ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, antara lain *pertama*, supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban. *Kedua*, Nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu, berarti walaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. *Ketiga*, sebagai konsekuensi dari kedua prinsip tersebut, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.

Jika dilihat dari perspektif etika *deontologi*, contoh kasus di atas apapun alasannya, berbohong itu tidak dibenarkan secara moral. Tindakan berbohong tidak dapat dibenarkan secara moral karena bertentangan dengan hakikat kebenaran itu sendiri. Berbohong merupakan tindakan yang bertentangan dengan keutamaan kebenaran. Sebagai makhluk sosial, manusia mengkomunikasikan pikirannya kepada orang lain. Dalam tindakan komunikatif itu manusia dituntut untuk mengkomunikasikan gagasan atau pikirannya secara benar. Seseorang dikatakan berbohong jika berdasarkan kemauannya, dia memanipulasi pikirannya dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Kebohongan akan menjadi tindakan tidak bermoral yang sangat merugikan jika seseorang tidak hanya berkhianat terhadap pikirannya sendiri, tetapi juga mengakibatkan kerusakan bagi masyarakat.

Selain itu, perilaku berbohong yang dilakukan oleh politisi dalam contoh kasus di atas tidak sedang menghadapi sebuah dilema moral. Karena itu, hukum moral *deontologi* yang berbunyi “jangan berbohong!” seharusnya berlaku mutlak. Dalam konteks ini pula, tindakan berbohong demi kebaikan yang lebih besar (menurut etika utilitarisme) tidak bisa dibenarkan. Kebaikan lebih besar manakah yang diklaim

sebagai yang diuntungkan jika tindakan kebohongan publik itu sendiri merugikan kepentingan yang lebih besar?

Sementara pada etika *teleologi* yang berasal dari akar kata Yunani *telos*, yang berarti akhir, tujuan, maksud, dan *logos*, perkataan. *Teleologi* adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Istilah *teleologi* dikemukakan oleh Christian Wolff, seorang [filsuf Jerman abad ke-18](#). *Teleologi* merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan, akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal ini dicapai dalam suatu proses perkembangan. Dalam arti umum, *teleologi* merupakan sebuah studi filosofis mengenai bukti perencanaan, fungsi, atau tujuan di alam maupun dalam sejarah. Dalam bidang lain, *teleologi* merupakan ajaran filosofis-religius tentang eksistensi tujuan dan “kebijaksanaan” objektif di luar [manusia](#).

Dalam perspektif linear dengan etika *deontologis*, etika *teleologis* justru menitikberatkan pada tujuan atau akibat suatu tindakan. Sehingga suatu tindakan dinilai baik, apabila bertujuan mencapai sesuatu yang baik atau menimbulkan akibat yang baik. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk, apabila bertujuan mencapai sesuatu yang buruk. Dalam dunia etika, *teleologi* bisa diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan dilakukan, *teleologi* mengerti mana yang benar, dan mana yang salah, tetapi itu bukan ukuran yang terakhir. Yang lebih penting adalah tujuan dan akibat. Betapapun salahnya sebuah tindakan menurut hukum, tetapi jika itu bertujuan dan berakibat baik, maka tindakan itu dinilai baik. Ajaran *teleologi* dapat menimbulkan bahaya menghalalkan segala cara. Dengan demikian tujuan yang baik harus diikuti dengan tindakan yang benar menurut hukum. Perbincangan “baik” dan “jahat” harus diimbangi dengan “benar” dan “salah”. Lebih mendalam lagi, ajaran *teleologis* ini dapat menciptakan hedonisme, ketika “yang baik” itu dipersempit menjadi “yang baik bagi diri sendiri.

Menurut Kant, setiap norma dan kewajiban moral tidak bisa berlaku begitu saja dalam setiap situasi. Jadi, sejalan dengan pendapat Kant, etika *teleologi* lebih bersifat situasional karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu. Berdasarkan pembahasan etika *teleologi* ini muncul aliran-aliran *teleologi*, yaitu *egoisme* dan *utilitarianisme*.

Menurut etika *egoisme*, suatu perbuatan dinilai baik apabila memberikan manfaat, kebahagiaan atau kepentingan bagi dirinya sendiri (‘aku’) di atas kepentingan orang lain. Aliran ini mengalami perkembangan menjadi *egoisme etis* dan *egoisme psikologis*. Dalam *egoisme etis*, tindakan apapun termasuk mengorbankan diri untuk orang lain adalah untuk kepentingan pemuasan diri sendiri. Sedangkan *egoisme psikologis* berdasarkan pandangan bahwa semua orang selalu dimotivasi oleh tindakan demi kepentingan dirinya.

Aliran *Utilitarianisme* (*utilisme*) menilai bahwa baik-buruk suatu tindakan ditinjau dari segi kegunaan atau faedah yang didatangkannya. Terdapat dua jenis *utilitarianisme*, yaitu *utilisme individual*, yang berorientasi pada keuntungan dirinya, dan *utilisme sosial* yang berorientasi kepada kepentingan orang banyak. *Utilisme sosial* banyak dipraktikkan oleh kalangan politisi.

Mengutip pendapat John Stuart Mill (1806-1873) dalam bukunya *Utilitarianism* (1863) Burhanuddin Salam (1997: 77-78) memaparkan bahwa dua dasar pemikiran utiliter adalah dasar normatif dan dasar psikologis. *Dasar normatif* adalah setiap tindakan harus mengusahakan kebahagiaan dan menghindari ketidaknyamanan, sedangkan *dasar psikologis* menyebutkan semua tindakan berorientasi pada keharmonisan dengan sesama manusia. Secara keseluruhan etika *utilitarianisme*

dinilai positif karena dua hal, yaitu *rasionalitasnya* yang memungkinkan akibat baik yang lebih banyak dan *universalitasnya* yang memungkinkan akibat yang dicapai diukur dari banyaknya orang yang memperoleh manfaat.

Utilitarianisme bahkan bisa membenarkan suatu tindakan yang secara *deontologis* tidak etis sebagai tindakan yang baik dan etis, yaitu ketika ternyata tujuan atau akibat dari tindakan itu bermanfaat bagi banyak orang. *Utilitarianisme* sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Tidak ada paksaan bahwa seseorang harus bertindak dengan cara tertentu yang mungkin tidak diketahui alasannya mengapa demikian. Jadi, suatu tindakan baik diputuskan dan dipilih berdasarkan kriteria yang rasional dan bukan sekedar mengikuti tradisi atau perintah tertentu.

Kasus politisi yang tidak jujur jika dilihat dari perspektif etika *teleologi* dapat diasumsikan bahwa kebohongan yang dilakukan oleh politisi tersebut dengan maksud untuk mencapai kepentingan atau untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menghalalkan segala cara termasuk mengorbankan kejujuran.

C. PENUTUP

C.1 Simpulan

Sifat politik bukan sekedar pragmatis, yang hanya menyangkut suatu tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut, yang dapat ditangani dengan memakai rasionalitas. Politik lebih dari pragmatisme, tetapi mengandung sifat eksistensial dalam wujudnya karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai. Dalam politik ada keindahan dan bukan hanya kekotoran, ada nilai luhur dan bukan hanya tipu muslihat atau ketidakjujuran. Hal-hal inilah yang menyebabkan politik harus dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketika seseorang berpolitik kejujuran menjadi sesuatu yang langka, padahal kejujuran para politisi bukan hanya keutamaan dasar yang harus kita tuntut, melainkan merupakan dasar kepribadian yang integral dan bertanggung jawab. Orang jujur pertama-tama akan jujur terhadap dirinya sendiri, membenci segala macam rasionalisasi. Akhirnya, orang jujur tidak perlu mengompensasikan perasaan minder dengan menjadi otoriter dan menindas. Kejujuran adalah prasyarat semua keutamaan moral lainnya. Semua sikap moral yang pada dirinya sendiri kita puji akan kehilangan nilai mereka bila orang yang memperlihatkannya tidak jujur.

Kurangnya etika berpolitik sebagaimana perilaku politisi sekarang ini merupakan akibat dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai. Bangsa kita tidak banyak mempunyai guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana berpolitik tak hanya memperebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika serta moral. Politik yang mengedepankan *take and give*, berkonsensus, dan pengorbanan. Selain itu kurangnya komunikasi politik juga menjadi penyebab lahirnya politisi yang tidak jujur. Sepertinya di Indonesia, mencari politisi yang sungguh-sungguh jujur, berintegritas dan santun, yang melakukan praksis politik dalam koridor moral dan etika sudah sangat sulit dan langka. Namun bahwa di antara sekian banyak elit politik, tentu masih ada yang menjadikan kejujuran sebagai basis etikanya. Tinggi rendahnya integritas moral seseorang dalam berpolitik menentukan tinggi rendahnya integritas kepribadian dan kualitas berpolitik dari sang politisi tersebut. Dengan masih adanya politisi kita yang bermoral, memungkinkan kita bisa berharap akan adanya perbaikan politik dan moral bangsa yang sedang bobrok jatuh di titik nadir. Dan dengan demikian, ke depannya masih ada orang yang bisa dipilih untuk kepentingan mengembangkan kebajikan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Bertens, K. (1997). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Brownlee, Malcom. (1982). *Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-faktor di dalamnya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Darmaputera, E. (1993). *Etika Sederhana untuk Semua: Perkenalan Pertama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Fouclaut, Michel. (1976). *History of Sexuality*. Panteon Books, New York
- <http://www.poskotanews.com/2013/06/02/kunjungan-priyo-budi-santoso-menuai-kritik/>
diakses tanggal 20 Juni 2013, Jam 02.14 WIB
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/golkar-semprit-priyo-budi-santoso-kunjungi-tahanan-koruptor.html>
diakses tanggal 20 Juni 2013, Jam 02.18 WIB
- Salam, Burhanuddin, 1997. *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.

